

**ANALISIS BELUM OPTIMALNYA REALISASI ANGGARAN  
BELANJA PADA BAGIAN UMUM SETDA MALUKU**

Jaelani La Masidonda<sup>1</sup>, Muslim<sup>2</sup>, Ayun Karmila Nursan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Darussalam Ambon  
E-mail: dwi.hariyanti1976@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the not yet optimal realization of the expenditure budget at the Maluku Regional Secretariat General Bureau. This study uses a quantitative descriptive research approach and is supported by in-depth interviews, in which the researcher explains existing phenomena using numbers to obtain an overview and characteristics of the conditions under study. Data collection is done by means of interviews, observation (observation) and documentation. Data analysis techniques use spending variance and spending growth. The results of this study indicate that the results of the analysis of variance on state spending in 2019 - 2020 show an increase. Meanwhile, the results of the analysis of budget growth in 2020 show not good. This is because the growth value is negative, which is caused by refocusing.

Keywords: Analysis, Budget, Expenditure Realization

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis belum optimalnya realisasi anggaran belanja Pada Biro Umum Setda Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dan didukung wawancara mendalam yaitu peneliti menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai keadaan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara, Observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan varians belanja dan pertumbuhan belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis varian atas belanja belanja Negara pada tahun 2019 - 2020 menunjukkan peningkatan. Sedangkan, hasil analisis pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2020 menunjukkan tidak baik. Hal ini dikarenakan karena nilai pertumbuhannya negative, yang disebabkan adanya refocussing.

Kata Kunci : Analisis, Anggaran, Realisasi Belanja

**1. PENDAHULUAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu (Ratmono & Solihin, 2015). LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian LRA harus disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penyajian LRA yang merupakan indikator pengukuran kinerja suatu instansi cenderung ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran. Instansi dapat dikatakan berhasil jika mampu menyerap anggaran dengan baik mendekati seratus persen anggaran pemerintah.

Laporan LRA (PP No.71 Tahun 2010) memiliki tujuan diantaranya adalah: (1)

menetapkan dasar dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, (2) memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomenanya menunjukkan agak berbeda yaitu tidak tercapainya target di Propinsi Maluku. Salah satunya adalah bagian Biro di Setda Maluku pada Tahun 2020 dimana anggaran belanja instansi tidak mampu merelisasikan sesuai dengan target yang telah disepakati. Berikut ini data rincian dan realisasi belanja tahun anggaran 2020.

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A 2020

Uraian	Tahun 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	179.556.000,00	176.796.000,00	98,46
Belanja Barang Dan Jasa	5.143.803.000,00	4.536.552.702,93	88,19
Belanja Modal	7.820.000.000,00	3.619.950.321,00	46,29
Jumlah	13.143.359.000,00	8.333.299.023,93	63,40

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Biro Umum Setda Maluku Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa Realisasi belanja Biro Umum Setda Maluku pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 8.333.299.023,93 atau 63,40 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 13.143.359.000, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp 176.796.000,00 atau 98,46 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 179.556.000,00, Realisasi Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 4.536.552.702,93 atau 88,19 persen dari anggaran belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 5.143.803.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 3.619.950.321,00 atau 46,29 persen dari anggaran belanja Modal sebesar Rp 7.820.000.000,00.

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2020 anggaran belanja pada Biro Umum Setda Maluku hanya terealisasi sebesar Rp 8.333.299.023,93 atau 63,40 %. Hal ini tidak sesuai dengan target persentasi yang sudah di tetapkan pada Biro Umum Setda Maluku yaitu sebesar 90 – 95 %.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas peneliti berkeinginan melakukan penelitian terkaitnya belum optimalnya realisasi anggaran belanja daerah khususnya pada Biro Umum Setda Maluku dengan analisis varian dan pertumbuhan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Arif (2009:36) Laporan realisasi anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta perbandingan antara realisasi tersebut dan anggaran dalam satu periode pelaporan. Dengan demikian komponen dari laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dalam standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2011: 31) menyatakan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. SAP (2011: 91) menyatakan Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut , (standar akuntansi pemerintah 2007:85) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Maluku yaitu pada Biro Umum Setda Maluku yang beralamat di Kantor Gubernur Maluku Jl. Raya Pattimura No. 1 Ambon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kuantitatif dan dikukung oleh wawancara secara mendalam, yaitu penelitian yang bertujuan untuk untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai

keadaan yang diteliti. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Realisasi pada Biro Umum Setda Maluku, serta di perkuat dengan hasil wawancara bersama informan penelitian.

Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini yaitu bentuk laporan, catatan realisasi anggaran belanja. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi informan yaitu Kepala Biro/KPA , Bendahara Biro dan Bagian Perencanaan. Objek penelitian yang menjadi pusat penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Biro Umum Setda Maluku dari Tahun 2019 sampai dengan 2020. Teknik pengumpulan data tersebut di lakukan dengan cara Wawancara dan Metode Observasi (Pengamatan)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nuryaman (2015:06) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh gambaran atau deskriptif tentang karakteristik tertentu dari suatu objek yang sedang

$$Pertumbuhan = \frac{realisasi\ belanja\ t_1 - realisasi\ belanja\ t_1 - 1}{realisasi\ belanja\ t_1 - 1} \times 100\%$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang

**Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Biro Umum Setda Maluku tahun 2019-2020**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
2019	<b>Anggaran</b>	<b>17.231.422.145,00</b>	<b>14.691.273.096,00</b>	<b>2.540.149.049,00</b>
	Belanja Modal	7.741.545.500,00	6.789.265.271,00	952.280.229,00
	Belanja Barang Dan Jasa	9.248.834.645,00	7.666.084.825,00	1.582.749.820,00
	Belanja Pegawai	241.042.000,00	235.923.000,00	5.119.000,00
2020	<b>Anggaran</b>	<b>13.143.359.000,00</b>	<b>8.333.299.023,00</b>	<b>4.810.059.977,00</b>
	Belanja Modal	7.820.000.000,00	3.619.950.321,00	4.200.049.679,00
	Belanja Barang Dan Jasa	5.143.803.000,00	4.536.552.702,93	607.250.297,07
	Belanja Pegawai	179.556.000,00	176.796.000,00	2.760.000,00

Sumber: data Biro Umum Setda Maluku (*lampiran 1 dan 2*)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar Rp 17.231.422.145 dengan jumlah yang teralisasi sebesar Rp 14.691.273.096 dengan selisih belanja sebesar Rp 2.540.149.049 merupakan belanja yang berasal dari belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar Rp 13.143.359.000 dengan jumlah belanja yang teralisasi sebesar Rp 8.333.299.023

menjadi perhatian dalam objek penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. Data laporan keuangan Biro Umum Setda Maluku dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang diperoleh kemudian akan di analisis dengan menggunakan :

Analisis Varians Belanja

Untuk Melihat Apakah Pemerintah Pada Umumnya Telah Memanfaatkan APBD dengan baik. Varians Belanja Diukur Dengan Menggunakan Selisih Antara Realisasi Belanja Dengan Belanja Yang Dianggarkan Yaitu:

varian=anggaran belanja -realisasi belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja berfungsi untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. (Prasetya, 2011). Berikut data terkait laporan realisasi anggaran belanja Kantor Biro Umum Setda Maluku dapat di lihat pada tabel berikut.

dengan selisih belanja sebesar Rp 4.810.059.977 merupakan belanja yang berasal dari belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Naik turunnya anggaran dan realisasi anggaran karena terjadinya *refocussing*. Menurut bendahara kantor Biro Umum Setda Maluku; penyebab anggaran tidak terealisasi secara signifikan adalah karena adanya *refocussing* anggaran di kembalikan ke kas daerah yang kemudian dialihkan pada pendanaan covid ditahun 2020 sehingga dari total anggaran yang harus terealisasi pada program/ kegiatan ditahun 2020

tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari informan A (bendahara) yang menjelaskan bahwa :

“ Anggaran dan belanja tidak dapat terealisasi secara optimal karena tidak secara keseluruhan program dapat terlaksana, selain itu juga akibat dari *refocussing*”

Dalam menentukan selisih peneliti mengacu pada pendapat dari Mahmudi, 2010 yang menjelaskan bahwa untuk menghitung selisih anggaran dan realisasi anggaran menurut dapat dilakukan dengan cara anggaran belanja di kurangi dengan realisasi belanja. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. Selisih Realisasi Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varian Belanja (Rp)	Perbandingan (%)
2019	17.231.422.145,00	14.691.273.096,00	2.540.149.049,00	85,3
2020	13.143.359.000,00	8.333.299.023,00	4.810.059.977,00	63,4

Sumber: data Biro Umum Setda Maluku

Pada tabel 3. menjelaskan pada tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja adalah sekitar Rp 2.540.149.049 atau sekitar 85,3% , menyisakan perbandingan persentase sekitar 14,7% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi. Pada tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan Varians Belanja adalah Rp 4.810.059.977 atau sekitar 63,4%, menyisakan perbandingan persentase sekitar 36,6% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi. Terlihat kenaikan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 21,9% jika memperhatikan pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dalam penyerapan penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi keuangan yang mengalami penurunan penggunaan

dalam memenuhi keperluan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi tidak memuaskan, namun demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena adanya penghematan anggaran. Pembiayaan dari penggunaan anggaran yang lebih akan menjadi SiLPA dalam pembiayaan di tahun berikutnya.

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya (Halim, 2011). Dalam menghitung pertumbuhan peneliti mengacu pada pendapat Muhmudi (2010) seperti penjelasan dari bagian metodologi. Adapun hasil perhitungna pertumbuhan sebagai berikut :

Tabel 4. Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Biro Umum Setda Maluku tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020	Naik/Turun	Pertumbuhan
Realisasi belanja	14.691.273.096,00	8.333.299.023,00	-6.357.974.073,00	-43,28%

Sumber: data Biro Umum Setda Maluku

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif sebesar - Rp 6.357.974.073, namun ditinjau dari segi

persentase pertumbuhan belanja mengalami penurunan belanja sebesar -43,28%. Secara umum Kantor Biro Umum Setda Maluku belum melakukan pemanfaat Belanja dalam APBD secara efisien.

Tabel 5. Pertumbuhan Realisasi Mata Anggaran Belanja Kantor Biro Umum Setda Maluku tahun 2019 – 2020

No	Uraian	Realisasi		Naik/Turun	Growt
		2019	2020		
1	Belanja Modal	6,789,265,271.00	3,619,950,321.00	3,169,314,950.00	46.68%
2	Belanja Pegawai	235,923,000.00	176,796,000.00	- 59,127,000.00	- 25.06%
3	Belanja Barang dan Jasa	7,666,084,825.00	4,536,552,702.93	3,129,532,122.07	40.82%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan ditahun 2019 sampai dengan tahun

2020 semua mata anggaran belanja mengalami penurunan dengan nilai yang didapatkan negatif sebesar -Rp 3,169,314,950.00 atau -46.68% untuk

mata anggaran belanja modal,- Rp 59,127,000.00 atau -25.06% untuk mata anggaran belanja pegawai dan -Rp 3,129,532,122.07 atau -40.82% untuk mata anggaran belanja barang dan jasa.

Penurunan mata anggaran pada tahun 2020 terjadi *refocussing* atau biaya dikembalikan ke kas daerah yang kemudian dialihkan pada anggaran penanganan covid 19 ditahun 2020 maupun pada program lainnya . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari informan M yang menjelaskan bahwa :

“ Realisasi anggaran berkurang karena adanya *refocussing* ke kas daerah”

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari analisis kinerja anggaran varian belanja untuk tahun anggaran 2019 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.2.540.149.049
2. Ditahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran berdasarkan varian belanja sangat signifikan yaitu sebesar Rp 4.810.059.977
3. Kinerja anggaran belanja pada kantor Biro Umum Setda Maluku dilihat dari analisis varians belanja selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran yang diterapkan sehingga Biro Umum Setda Maluku sudah mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.
4. Ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020 semua mata anggaran belanja mengalami penurunan dengan nilai yang didapatkan negatif sebesar – Rp 3,169,314,950.00 atau -46.68% untuk mata anggaran belanja modal,- Rp 59,127,000.00 atau -25.06% untuk mata anggaran belanja pegawai dan -Rp 3,129,532,122.07 atau -40.82% untuk mata anggaran belanja barang dan jasa
5. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada kantor Biro Umum Setda Maluku berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2020 pertumbuhan belanja bernilai negatif sebesar (0,43) hal ini disebabkan oleh anggaran belanja kantor Biro Umum Setda Maluku mengalami penurunan signifikan akan anggaran dari tahun sebelumnya

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan

penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Biro Umum Setda Maluku

- a. Dari segi Pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
- b. Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada pada Biro Umum Setda Maluku sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Kristanto. 2018. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Anthony Robert, R; Govindarajan. 1998. Management Control System, Ninth Edition. The Mc Grow-Hill.
- Arief, Z.R & Weni, K.S. 2009. Neonatus & Asuhan Keperawatan Anak. Cetakan pertama. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Conny R. Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:Grasindo.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Garrison, Ray H. Noreen, Eric W & Brewer, Peter C. 2007. Akuntansi manajerial Buku 1, Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Gege Edi Prasetyo. 2010, Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Halim, Abdul. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Julita. 2011. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Gizi Ibu dengan Status Gizi
- Balita. Skripsi. FK. UNILAM. Lampung
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, ed. 2.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Munandar, M. 1985. Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja
- Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nuryaman. Christina, V. 2014. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktek. Bogor. Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. tentang Pelaporan. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005. Tentang Standarisasi Akuntansi. Pemerintahan. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005. tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rahayu, Ani Sri. 2013. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ratmono, Dwi & Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua
- Renyowijoyo Muindro. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2011. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Supriyono, R.A. 2011. Akuntansi Biaya, buku 2, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Supriyono. 1987. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tamasoleng, Adelstin, 2015. Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jati : Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/7522>, Vol 3 No 1, pp 97-110
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.